

Peran Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Dalam Transisi Dan Likuidasi Satker Pada Restrukturisasi Kemenkumham Tahun 2025

Tengku Yola Dhazira

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
E-mail: yoladhazira@gmail.com

Article History:

Received: 12 Desember 2025

Revised: 30 Desember 2025

Accepted: 06 Januari 2026

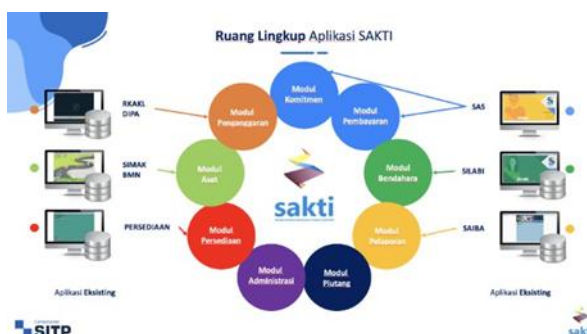
Keywords: SAKTI, Likuidasi, Sistem Keuangan Pemerintah, Restrukturisasi Organisasi, Studi Kasus Kualitatif.

Abstract: Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan perannya dalam mendukung proses likuidasi satuan kerja (satker) setelah pemisahan struktur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada tahun 2025. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen dengan informan terpilih yang merupakan pengguna SAKTI di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat. Informan dipilih berdasarkan pengalaman dan tingkat pemahaman mereka dalam memanfaatkan SAKTI untuk kegiatan pengelolaan keuangan selama masa transisi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SAKTI berperan signifikan dalam memfasilitasi proses likuidasi, terutama dalam aspek rekonsiliasi anggaran, pelaporan aset, transaksi mengendap, serta konsolidasi informasi keuangan. Pengguna menilai SAKTI bermanfaat karena fitur-fiturnya yang terintegrasi dan alur kerja yang terstandarisasi; namun, beberapa tantangan masih muncul, termasuk lambatnya kinerja sistem, keterbatasan penguasaan modul oleh sebagian pengguna, serta ketidaklengkapan migrasi data selama restrukturisasi organisasi. Studi ini juga mengindikasikan bahwa efektivitas sistem dipengaruhi oleh kompetensi pengguna, kesiapan organisasi, dan kecukupan dukungan teknis. Secara keseluruhan, SAKTI memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akurasi, transparansi, dan kontrol administrasi selama proses likuidasi satker. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan pengguna, peningkatan koordinasi antar unit, serta perbaikan stabilitas sistem untuk mengoptimalkan peran SAKTI dalam proses restrukturisasi di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia pada tahun 2025 memasuki fase restrukturisasi organisasi yang signifikan melalui pemisahan menjadi tiga unit utama, yaitu Unit Hukum, Unit HAM, dan Unit Imigrasi/Pemasyarakatan (Imipas). Restrukturisasi ini menuntut penataan ulang proses bisnis, tata kelola, serta pertanggungjawaban keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) pada setiap Satuan kerja (Satker) yang terdampak. Salah satu konsekuensi langsung dari kebijakan tersebut adalah dilakukannya proses likuidasi dan penutupan Satker lama, termasuk penyusunan laporan keuangan akhir, rekonsiliasi aset dan persediaan, serta pemindahan data ke Satker baru.

Dalam konteks ini, keberadaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) menjadi sangat strategis. SAKTI merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara secara elektronik mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran, komitmen, pembayaran, hingga pelaporan. Di tengah kompleksitas proses likuidasi Satker, SAKTI diharapkan mampu mempermudah konsolidasi data, meningkatkan akurasi pencatatan, serta memastikan kelancaran rekonsiliasi keuangan antar-unit.



Gambar 1. Ruang Lingkup Aplikasi SAKTI

Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa tidak seluruh Satker mampu memanfaatkan SAKTI secara optimal. Tantangan seperti pemahaman user yang berbeda-beda, keterbatasan kompetensi teknis, kendala jaringan, serta belum terdokumentasinya prosedur likuidasi pada SAKTI secara komprehensif menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas implementasi. Selain itu, perubahan organisasi secara besar-besaran sering kali menimbulkan learning curve baru bagi para pegawai.

Melihat fenomena tersebut, penting untuk melakukan penelitian yang secara mendalam menganalisis implementasi SAKTI dalam mendukung proses likuidasi Satker pada Kementerian Hukum Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi para pengguna SAKTI di lingkungan Satker yang sedang atau telah melalui proses likuidasi. Informan ditetapkan secara purposive berdasarkan peran mereka sebagai user SAKTI serta tingkat pengetahuan dan keterlibatan dalam proses pengelolaan keuangan dan BMN.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berperan penting dalam meningkatkan akurasi, transparansi, dan integrasi pengelolaan keuangan pemerintah. Studi Aisyah dan Nugroho (2022) menegaskan bahwa SAKTI mampu memperbaiki kualitas pencatatan dan konsolidasi data keuangan, sementara Ardianto dan Pratama (2023) menemukan bahwa pemanfaatan SAKTI memperkuat akuntabilitas fiskal pada satker di kementerian. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya

berfokus pada efektivitas operasional SAKTI dalam kondisi organisasi yang stabil, bukan pada situasi perubahan struktural. Demikian pula, kajian Rahayu dan Wijayanti (2022) mengenai manajemen perubahan organisasi menekankan pentingnya kesiapan SDM dan adaptasi sistem, tetapi tidak secara spesifik mengaitkan temuan tersebut dengan proses likuidasi satker atau restrukturisasi kelembagaan. Belum banyak penelitian yang menelaah bagaimana SAKTI digunakan dalam konteks pemisahan instansi dan likuidasi satker, khususnya pada kementerian besar seperti Kemenkumham yang mengalami penataan ulang struktur secara menyeluruh pada tahun 2025. Kesenjangan penelitian inilah yang menjadikan studi ini penting, karena proses likuidasi membutuhkan konsolidasi data lintas modul, rekonsiliasi BMN dan persediaan, serta penutupan laporan keuangan yang sangat bergantung pada ketepatan penggunaan SAKTI. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggali pengalaman empiris pengguna SAKTI dalam situasi transisi organisasi yang kompleks, sekaligus memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang peningkatan tata kelola keuangan pemerintah pada masa restrukturisasi.

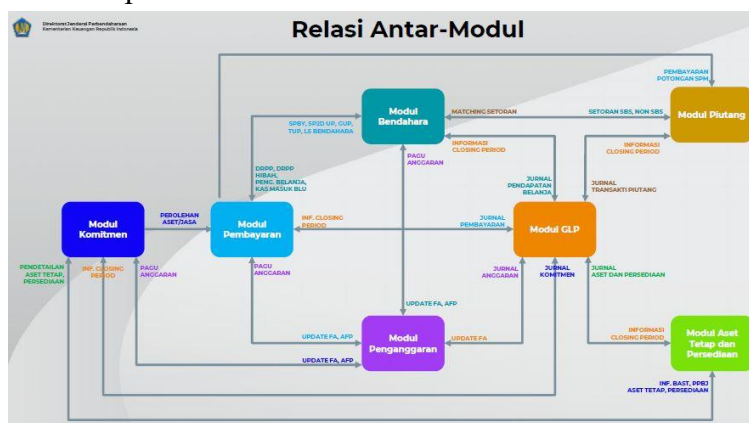
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola keuangan pemerintah, khususnya pada masa transisi organisasi, sekaligus memberikan rekomendasi bagi Kemenkum maupun Kementerian Keuangan dalam pengembangan pedoman dan dukungan teknis implementasi SAKTI di masa mendatang.

LANDASAN TEORI (Times New Roman, size 12) (Jika Ada)
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

SAKTI adalah aplikasi terintegrasi yang digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. SAKTI mencakup modul-modul: Administrasi, Penganggaran, Komitmen, Persediaan, Aset Tetap, Bendahara, Pembayaran, dan Pelaporan. Konsep utama SAKTI adalah one database, one application, sehingga seluruh data keuangan pada level Satker tercatat dalam satu sumber data yang mengurangi duplikasi dan meningkatkan keakuratan (DJPb, 2020).

Dalam konteks likuidasi Satker, SAKTI berperan penting dalam:

1. Penyusunan laporan keuangan akhir Satker.
2. Rekonsiliasi BMN, persediaan, dan kas.
3. Penyiapan dokumen pemindahan saldo dan aset.
4. Menghindari kesalahan pencatatan dan mismatch data antar-modul.



Gambar 2. Relasi Antar-Modul Aplikasi SAKTI

Peranan-peranan tersebut berhubungan satu sama lain dalam rangka proses perencanaan, pelaksanaan, dan tanggung jawab dari setiap modul yang terdapat dalam aplikasi SAKTI. Terdapat tujuh individu yang memegang akses user SAKTI di Kementerian Hukum Jawa Barat yang berfungsi sebagai Administrator, Operator, Validator, dan Approver. Administrator adalah pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi administratif teknis SAKTI. Kemudian, operator SAKTI memiliki tanggung jawab untuk menjalankan, menciptakan, dan mencatat transaksi data SAKTI, termasuk Operator pembayaran, pelaporan, komitmen, anggaran, aset, dan persediaan. Berikutnya, Validator bertugas untuk memverifikasi data dari seorang operator, yang di Kementerian Hukum Jawa Barat meliputi PPK dan PPSPM. Sedangkan Approver adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab untuk menyetujui semua transaksi dan laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SAKTI, biasanya dijalankan oleh seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu Kepala Kantor Kementerian Hukum Jawa Barat.

Setiap pengguna SAKTI di Kementerian Hukum Jawa Barat bisa menjalankan lebih dari satu peran user SAKTI. Dengan demikian, dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), Kementerian Hukum Jawa Barat masih kurang optimal dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, mengingat kapasitas dan kualitas organisasi terkait beban kerja yang ada. Jika seorang pengguna SAKTI menjalankan dua peran atau lebih, dapat muncul masalah dalam pengoperasian aplikasi SAKTI dan juga dapat mengganggu efisiensi waktu, karena mereka harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing peran yang diemban. Namun, hal ini tidak akan menjadi masalah jika tidak terdapat benturan regulasi dan pegawai pengguna SAKTI mampu mengatur kapan menjalankan setiap peran tersebut.

Kepentingan manajerial internal di Kementerian Hukum Jawa Barat dapat dilaksanakan dengan baik berkat akses terhadap informasi keuangan di SAKTI, yang memudahkan serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Kementerian Hukum Jawa Barat merasakan perubahan positif dan konstruktif dari penerapan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan, yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tanggung jawab laporan keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berbasis kinerja.

Implementasi Sistem Informasi

Implementasi sistem informasi dapat didefinisikan sebagai proses operasionalisasi sistem teknologi informasi dalam suatu organisasi hingga sistem tersebut berjalan secara efektif (Laudon & Laudon, 2018). Proses implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti :

1. kompetensi pengguna,
2. dukungan manajemen,
3. kualitas sistem,
4. kualitas informasi yang dihasilkan,
5. serta kesiapan organisasi terhadap perubahan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah, implementasi sistem informasi yang baik menjadi kunci untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efektivitas Sistem Informasi (Model DeLone & McLean)

Untuk menilai efektivitas implementasi SAKTI, dapat digunakan model DeLone & McLean

(2003) yang mencakup:

1. *System Quality* (kualitas sistem) : Kemudahan penggunaan, keandalan, kecepatan, tampilan antarmuka.
2. *Information Quality* (kualitas informasi) : Akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu.
3. *Service Quality* (kualitas layanan) : Dukungan helpdesk, bimbingan teknis, pelatihan.
4. *Use* (penggunaan) : Intensitas penggunaan, pemanfaatan fitur.
5. *User Satisfaction* : Kepuasan user terhadap aplikasi.
6. *Net Benefits* : Manfaat yang dirasakan organisasi, seperti efisiensi, efektivitas, dan pengendalian internal.

Model ini relevan digunakan untuk menganalisis tingkat keberhasilan implementasi SAKTI dalam proses likuidasi Satker.

Penerimaan Teknologi Informasi (UTAUT)

Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi user dalam menerima dan menggunakan sistem teknologi. Empat konstruk utama adalah:

1. *Performance Expectancy* : sejauh mana user percaya bahwa SAKTI akan meningkatkan kinerja mereka.
2. *Effort Expectancy* : tingkat kemudahan penggunaan aplikasi.
3. *Social Influence* : pengaruh pimpinan atau rekan kerja terhadap penggunaan SAKTI.
4. *Facilitating Conditions* : dukungan teknis, pelatihan, SOP, dan fasilitas pendukung.

Dalam konteks likuidasi Satker, UTAUT dapat membantu menilai kesiapan dan penerimaan pegawai terhadap penggunaan SAKTI dalam proses transisi organisasi.

Proses Likuidasi Satuan Kerja Pemerintah

Likuidasi Satker adalah tahapan penutupan unit kerja yang meliputi:

1. Penyelesaian seluruh transaksi keuangan,
2. Penyusunan laporan keuangan terakhir,
3. Penutupan buku,
4. Pemutakhiran data BMN,
5. Penyusunan Berita Acara Serah Terima aset dan saldo,
6. Terminasi atau pemindahan user dan database.

Keberhasilan likuidasi sangat bergantung pada integritas data dan ketepatan pencatatan yang sebagian besar kini bergantung pada SAKTI.

Tabel 1. Proses Likuidasi Satuan Kerja dalam Sistem SAKTI

Tahap	Aktivitas Utama	Output Dokumen /	Unit Terkait
1.Persiapan Likuidasi	• Penetapan satker yang akan dilikuidasi oleh Kemenkumham dan DJA/DJPb.	Surat Keputusan likuidasi	Kemenkumham, Kanwil DJPb, Satker

	• Penetapan tanggal efektif likuidasi. • Penutupan akses belanja baru pada modul Komitmen SAKTI.	satker.	
2.Inventarisasi Data & Aset	• Rekonsiliasi transaksi berjalan. • Inventarisasi BMN pada Modul Persediaan & Aset Tetap SAKTI. • Penyiapan penyerahan aset ke satker baru/instansi penerima.	Berita acara inventarisasi, daftar BMN, daftar persediaan.	PPK, Pengelola BMN, UAKPA
3.Penyelesaian Transaksi Berjalan	• Penyelesaian SP2D yang masih outstanding. • Penyelesaian komitmen, kontrak, dan tagihan. • Tutup periode transaksi pada Modul Perbendaharaan & Komitmen.	Laporan transaksi final, daftar outstanding yang ditutup.	PPK, PPSPM, KPPN
4.Rekonsiliasi Akhir di SAKTI	• Rekon internal antar-modul (Bendahara–Persediaan–Aset). • Rekon eksternal Aset, Persediaan, dan GLP • Pengesahan LRA/LO/Saldo Awal.	Laporan Rekonsiliasi Akhir. Berita Acara Rekon.	UAKPA, KPPN
5.Penyerahan Data & Aset	• Serah terima BMN, dokumen keuangan, dan arsip ke satker baru atau unit penerima. • Update status aset di SAKTI.	Berita Acara Serah Terima (BAST), dokumen pengalihan aset.	UAKPA, KPPN
6.Penutupan Akses SAKTI	• Penutupan role user satker lama. • Penonaktifan kode satker pada aplikasi SAKTI. • Migrasi saldo awal ke satker baru jika diperlukan.	Status SAKTI Satker nonaktif.	DJPb, Opr SAKTI
7.Pelaporan Likuidasi	• Penyusunan laporan posisi keuangan final satker. • Penyampaian laporan pertanggungjawaban akhir likuidasi ke kementerian dan KPPN.	Laporan Likuidasi Satker (Keuangan, BMN, Arsip).	Satker Kemenkum, KPPN

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam mendukung proses likuidasi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum Jawa Barat pada tahun 2025. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang dikaji bersifat kontekstual, kompleks, dan membutuhkan pemaknaan langsung dari pengalaman para pengguna SAKTI di lapangan.

Desain penelitian studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi fenomena implementasi aplikasi SAKTI secara holistik pada satu konteks tertentu, yaitu Satker Kemenkum Jawa Barat yang mengalami likuidasi akibat pemisahan organisasi. Studi kasus memungkinkan peneliti menggali proses, tantangan, persepsi, serta dinamika penggunaan SAKTI secara lebih komprehensif melalui berbagai sumber data.

Penelitian dilaksanakan pada beberapa Satuan kerja Kemenkum Jawa Barat yang terdampak proses likuidasi pada tahun 2025, yang terdiri dari 6 Satuan Kerja (Satker DIPA Sekretariat Jenderal, Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan, dan Peraturan Perundang-undangan). Subjek penelitian adalah Pegawai yang memiliki peran sebagai user/operator SAKTI, baik pada modul komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, maupun pelaporan. Fokus pada pengguna dipilih karena mereka merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan aplikasi dan mengetahui kondisi riil implementasi saat proses likuidasi berlangsung.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria utama informan adalah:

1. Pegawai yang bertindak sebagai user atau operator aplikasi SAKTI.
2. Memiliki pengalaman langsung dalam proses pencatatan, rekonsiliasi, atau pelaporan selama masa likuidasi Satker.
3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait modul SAKTI yang dikelolanya.
4. Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan partisipatif.

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif ini sebanyak 7 orang.

Tabel 2. Karakteristik Informan

No.	Karakteristik Informan	Jumlah (n)	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	3	42,86%
	Perempuan	4	57,14%
2	Usia		
	21–30 Tahun	5	71,43%
	31–40 Tahun	2	28,57%
3	Pendidikan		
	S1	5	71,43%
	S2	2	28,57%

4 Jabatan		
Operator Keuangan	2	28,57%
Bendahara	2	28,57%
Operator Aset dan Persediaan	2	28,57%
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1	14,29%

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari tiga langkah utama:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data disusun berdasarkan tema seperti kualitas sistem, kendala user, proses likuidasi, dan manfaat aplikasi.

2. Penyajian Data (Data Display)

Menyajikan data dalam bentuk tabel, kutipan naratif, atau uraian deskriptif sehingga pola hubungan antar-temuan dapat terlihat jelas.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal diuji secara terus menerus melalui pencocokan data, triangulasi sumber, dan pengecekan ulang dengan informan bila diperlukan. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan kontribusinya dalam proses likuidasi satuan kerja di lingkungan Kemenkumham Jawa Barat setelah pemisahan struktur organisasi pada tahun 2025. Hasil penelitian disajikan dalam beberapa tema temuan utama yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Observasi

No.	Uraian Observasi	Ya	Tidak	Keterangan
1	Tersedia dokumen rencana kebutuhan anggaran pada masa likuidasi	√		Surat usulan kebutuhan likuidasi Satker
2	Tersedia SOP penggunaan modul-modul SAKTI selama masa transisi	√		SOP Penggunaan Modul Komitmen, Pembayaran, dan Aset
3	Ketersediaan komputer/laptop memadai untuk menjalankan SAKTI	√		Fasilitas kantor mendukung, spesifikasi sesuai ketentuan
4	Ketersediaan SDM pengguna yang ditetapkan melalui SK	√		SK Penetapan Operator SAKTI & Pengelola BMN
5	Modul Komitmen digunakan untuk penyelesaian sisa kontrak saat likuidasi	√		Digunakan untuk verifikasi akhir sisa anggaran
6	Modul Pembayaran dapat digunakan	√		Beberapa kendala jaringan

	tanpa gangguan untuk penyelesaian pembayaran terakhir			terjadi tetapi dapat diatasi
7	Modul Persediaan digunakan untuk pencatatan pemindahan barang	√		Didukung oleh Berita Acara Serah Terima Persediaan
8	Modul Aset Tetap digunakan untuk finalisasi data aset satker	√		Rekonsiliasi BMN dilakukan bersama UAKPW/UAKPA
9	Arsip digital dokumen likuidasi (BAST, register BMN) tersedia dan tersimpan	√		Sistem arsip digital digunakan sebagai pendukung
10	Koordinasi antara operator SAKTI, PPK, dan Bendahara berjalan efektif	√		Dibuktikan dengan notulen rapat tim likuidasi
11	Terdapat dukungan teknis (<i>helpdesk</i>) SAKTI selama proses likuidasi	√		Bantuan melalui Kanwil DJPb & grup koordinasi WA
12	Data migrasi sebelum pemisahan instansi berjalan lancar tanpa data hilang		√	Beberapa data transaksi perlu penyesuaian manual

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum), peneliti menemukan bahwa proses transisi dan likuidasi Satker akibat restrukturisasi organisasi tahun 2025 sangat bergantung pada kesiapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI). Observasi dilakukan pada aspek dokumen, sistem informasi, kesiapan SDM, dan ketersediaan infrastruktur. Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa secara umum SAKTI telah mendukung proses migrasi, pemisahan, dan penutupan Satker lama dengan baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala teknis di lapangan.

Pertama, hampir seluruh satker telah menyiapkan rencana kebutuhan data dan dokumen terkait proses likuidasi. Adanya surat permintaan data yang terstruktur dari unit eselon I mempermudah inventarisasi dokumen transaksi serta meminimalkan risiko kurangnya kelengkapan administrasi saat proses pemisahan. Selain itu, telah tersedia SOP internal yang mengatur penggunaan SAKTI dalam rangka transisi dan pemisahan unit kerja. SOP tersebut mencakup pemisahan transaksi, migrasi data, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan satker lama.

Pada aspek teknis, modul-modul di dalam SAKTI khususnya Modul Aset Tetap, Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP), dan Modul Pelaporan telah dimanfaatkan dalam proses rekonsiliasi dan pemutakhiran data aset. Modul Aset Tetap digunakan untuk kegiatan stocktaking dan penghapusan BMN, sementara Modul GLP berperan dalam proses penutupan buku dan pemisahan saldo antara satker lama dan satker baru. Modul Pelaporan juga menunjukkan kesiapan dalam menghasilkan laporan keuangan masing-masing satker baru setelah restrukturisasi.

Kesiapan SDM juga tercatat cukup baik. Operator telah mendapatkan pendampingan teknis dari KPPN maupun unit pusat terkait migrasi data dan likuidasi satker. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kekurangan jumlah SDM dikarenakan banyaknya SDM sebelumnya yang pindah ke Satker baru, sehingga membuat proses berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Untuk menjaga validitas data hasil migrasi, unit Akuntansi Tingkat Wilayah dan Eselon I melakukan pemeriksaan (*review*) sebelum proses finalisasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya selisih atau ketidaksesuaian saldo antar-satker baru.

Terakhir, pada tahap pasca-migrasi, Satker telah melakukan rekonsiliasi ulang bersama Unit Eselon I untuk memastikan tidak terdapat selisih yang timbul akibat perpindahan data sistem. Proses rekonsiliasi ini penting karena menentukan kualitas laporan keuangan dan BMN pada unit hasil restrukturisasi.

Secara keseluruhan, observasi menunjukkan bahwa SAKTI berperan signifikan dalam mendukung transisi dan likuidasi Satker Kemenkum tahun 2025. Meskipun ditemukan kendala tekni, sistem dan SDM pada umumnya telah siap, serta mekanisme kontrol internal berjalan cukup memadai untuk memastikan akurasi dan keandalan data keuangan pada masa transisi organisasi.

Hasil penelitian dalam beberapa tema temuan utama lalu juga dibahas dengan mengacu pada teori DeLone & McLean (2003) dan UTAUT :

1. Kualitas Sistem (System Quality) : Efisiensi tetapi belum sepenuhnya stabil

Sebagian besar informan menyatakan bahwa SAKTI membantu percepatan penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi pada masa likuidasi. Namun, terdapat kendala terkait stabilitas sistem dan beban server pada periode tertentu, terutama saat mendekati penutupan periode.

Seorang operator dari bagian pelaporan menyampaikan :

“Secara umum SAKTI sangat memudahkan karena semua modul saling terhubung satu dengan yang lainnya. Tapi saat likuidasi kemarin beberapa kali sistem SAKTI maintenance sistem sehingga kita harus menunggu SAKTI dapat dioperasikan kembali” (Operator Pelaporan Satker)

Observasi lapangan mendukung pernyataan tersebut. Pada saat proses rekonsiliasi atau penutupan periode ternyata SAKTI sedang *maintenance* sehingga harus menunggu hingga dapat dilakukan penutupan periode. Dari perspektif teori, temuan ini menunjukkan bahwa kualitas sistem belum mencapai stabilitas optimal, sehingga mempengaruhi variabel *Use* dan *User Satisfaction*. Hal ini sejalan dengan DeLone & McLean (2003) bahwa kualitas sistem merupakan determinan utama keberhasilan implementasi sistem informasi.

2. Kualitas Informasi (Information Quality) : Akurat namun memerlukan verifikasi langsung

Akurasi data dalam SAKTI dinilai cukup baik selama proses likuidasi. Integrasi antar-modul membantu mengurangi kesalahan pencatatan dan duplikasi data yang biasanya terjadi dalam sistem manual. Namun, beberapa informan mengungkapkan masih perlu dilakukan verifikasi langsung, terutama untuk modul Aset Tetap dan Persediaan.

Seorang operator dari bagian Aset dan Persediaan menyampaikan :

“Pencatatan pada Sistem SAKTI Modul Aset dan Persediaan harus melakukan cek fisik terlebih dahulu, dikarenakan bisa saja data BMN yang tercatat belum dilakukan update, sehingga harus dilakukan penyesuaian sebelum dilakukan likuidasi ke Satker baru” (Operator Aset dan Persediaan Satker)

Dokumentasi menunjukkan bahwa data pada modul Aset tetap harus melalui proses cek langsung untuk memastikan bahwa kondisi aset sesuai. Ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas informasi tergolong baik, ketergantungan pada *update manual* tetap harus dilakukan.

3. Kemudahan Penggunaan dan Kompetensi User (Effort Expectancy)

Pengalaman pengguna menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan SAKTI sangat

dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan pelatihan pengguna.

Operator Modul Komitmen mengungkapkan :

“Kalau yang sudah terbiasa melakukan sehari-hari dan sesuai modul yang biasa dipegang maka akan cukup gampang mengikuti proses likuidasi. Namun ada juga beberapa pegawai yang masih kebingungan dikarenakan baru pertama kali terjadinya proses likudasi selama mereka bekerja.” (Operator Komitmen Satker)

Banyak pengguna baru mengalami *learning curve* saat harus menjalankan prosedur khusus likuidasi, seperti penutupan buku atau konsolidasi laporan akhir.

Temuan ini konsisten dengan konstruk *Effort Expectancy* dalam UTAUT, yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi tingkat penerimaan teknologi.

4. Dukungan Teknis dan Kondisi Fasilitas (Facilitating Conditions)

Dukungan dari Kanwil DJPb dan Hai CSO SAKTI dinilai cukup membantu, terutama pada kendala sulitnya menemukan user modul yang diperlukan.

Salah satu operator Admin Satker menyatakan:

“Ketika kami ingin melakukan proses likuidasi, diperlukan seluruh user modul termasuk user modul Admin setiap Satker. Selama ini Modul Admin jarang digunakan sehari-hari sehingga kita sudah tidak tau user Adminnya ada di Akun SAKTI siapa. Apalagi kalau user Modul Adminnya ada pada Pegawai yang pindah ke unit Satker baru. Maka bantuan dari helpdesk / Hai CSO SAKTI sangat membantu, karena proses pendaftaran Akun cukup cepat ditindaklanjuti. (Operator Admin Satker)

Selain itu, SOP likuidasi berbasis SAKTI terkadang masih belum terdokumentasi secara jelas, sehingga pengguna mengandalkan kombinasi pengalaman pribadi, diskusi informal, dan arahan KPPN atau Unit Eselon I masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa *facilitating conditions* sangat diperlukan, terutama dalam konteks perubahan organisasi besar.

5. Manfaat Sistem bagi Proses Likuidasi (Net Benefits)

Meskipun masih ada terdapat kendala teknis, SAKTI memberikan beberapa manfaat nyata dalam proses likuidasi, antara lain :

- Mempercepat penyusunan laporan keuangan akhir.
- Mengurangi risiko kesalahan pencatatan.
- Mempermudah *audit trail* dan pelacakan data.
- Mendorong tertib administrasi aset dan persediaan.
- Memastikan alur pencatatan lebih transparan dan dapat ditelusuri.

Pejabat Pembuat Komitmen Satker menyebutkan:

“Kalau tidak pakai SAKTI, sudah pasti jauh lebih lama. Dengan integrasi data secara menyeluruh sangat membantu seluruh Operator untuk mendapatkan data laporan keuangan dan BMN yang valid sebelum terjadinya proses migrasi ke Satker baru.” (Pejabat Pembuat Komitmen Satker)

Observasi peneliti menunjukkan bahwa Satker yang sudah menerapkan SAKTI sesuai petunjuk likuidasi lebih cepat menyelesaikan proses tutup buku dibandingkan Satker yang masih dalam tahap belajar proses likuidasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam mendukung proses likuidasi Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kemenkum Jawa Barat setelah terjadinya pemisahan organisasi pada tahun 2025. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis menggunakan model DeLone & McLean dan UTAUT, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut yaitu, SAKTI terbukti memberikan manfaat signifikan dalam proses likuidasi Satker, khususnya dalam hal integrasi data, percepatan proses penutupan buku, akurasi laporan keuangan, dan kemudahan rekonsiliasi antar-modul. Sistem ini membantu meminimalkan risiko kesalahan manual dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Kualitas sistem (system quality) dinilai sudah baik, namun masih terdapat kendala maintenance Aplikasi SAKTI pada periode likuidasi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas teknis aplikasi perlu terus diperkuat. Kualitas informasi (information quality) secara umum akurat dan terintegrasi, tetapi pada modul Aset Tetap dan Persediaan masih diperlukan verifikasi fisik/manual. Kompetensi pengguna sangat berperan dalam menentukan efektivitas penggunaan SAKTI. Pengguna yang sudah berpengalaman dapat mengoperasikan sistem dengan lancar, sementara pengguna baru membutuhkan pendampingan lebih intensif. Learning curve menjadi tantangan signifikan selama masa transisi organisasi. Dukungan teknis dan kondisi fasilitasi (facilitating conditions) dinilai membantu. Respons bantuan teknis cenderung cepat dari CSO SAKTI, namun SOP likuidasi berbasis SAKTI belum terdokumentasi secara lengkap. Kondisi ini memengaruhi kepuasan dan kelancaran kerja operator. Secara keseluruhan, implementasi SAKTI dalam proses likuidasi Satker dapat dianggap cukup efektif. Keberhasilan penggunaan SAKTI sangat dipengaruhi oleh faktor teknis, kesiapan SDM, alur komunikasi, serta dukungan kelembagaan selama masa restrukturisasi organisasi.

Keterbatasan yang perlu diperhatikan dari hasil penelitian yaitu ruang lingkup penelitian terbatas pada Satker Kemenkum Jawa Barat. Penelitian ini hanya berfokus pada unit-unit kerja yang mengalami proses likuidasi di wilayah Jawa Barat. Kondisi, tantangan, dan dinamika implementasi SAKTI di wilayah lain mungkin berbeda, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi secara luas untuk semua Satker Kemenkum di Indonesia. Lalu jumlah informan terbatas dan berpotensi bias pengalaman. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan peran sebagai user SAKTI. Jumlah informan yang terbatas dan heterogenitas kompetensi pengguna dapat memengaruhi keluasan perspektif. Temuan penelitian sangat bergantung pada pengalaman subjektif informan yang mungkin tidak merepresentasikan seluruh pengguna SAKTI. Dan data sangat bergantung pada kejujuran dan akurasi informasi dari informan. Wawancara dalam penelitian kualitatif sangat mengandalkan kemampuan informan dalam mengingat pengalaman, menjelaskan proses, serta kesiapan untuk bersikap terbuka.

Saran untuk Pimpinan Satker yaitu, dengan memperkuat kompetensi pengguna SAKTI dengan mengadakan pelatihan intensif, refreshment training, serta pendampingan khusus bagi pegawai yang mengalami rotasi tugas atau baru pertama kali mengoperasikan modul tertentu. Lalu menyusun SOP likuidasi berbasis SAKTI yang lebih terstruktur. SOP perlu mencakup alur kerja, peran operator, langkah penutupan modul, dan prosedur rekonsiliasi sehingga proses likuidasi lebih seragam dan tidak bergantung pada interpretasi masing-masing Satker. Selanjutnya meningkatkan koordinasi antarunit. Komunikasi antara bagian keuangan, BMN, SDM, dan perbendaharaan perlu diperkuat sehingga proses pemindahan data dan penyelesaian catatan keuangan berlangsung lebih efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Gharbi, K., & Naqvi, S. A. A. (2022). Evaluating information system success using DeLone and McLean model: A systematic review. *Journal of Information Systems*, 36(2), 45–62.
- Aisyah, S., & Nugroho, Y. (2022). Analisis efektivitas sistem aplikasi keuangan di pemerintah daerah: Studi empiris SAKTI. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 20(1), 45–60.
- Ardianto, R., & Pratama, I. (2023). Peran Sistem Informasi Perbendaharaan (SAKTI) dalam peningkatan transparansi keuangan Satker di kementerian/lembaga. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(2), 123–140.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. *Information Systems Research*, 3(1), 60–95.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). *Laporan evaluasi implementasi SAKTI di instansi pemerintah tahun 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025). *Laporan keuangan Satker likuidasi: Pedoman dan format laporan likuidasi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). *Rekonsiliasi SAKTI–SPAN (MONSAKTI): Laporan monitoring rekonsiliasi*.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan wilayah & BPS. (2024). *Case reports on BMN reconciliation and pra-rekonsiliasi activities*.
- Ghozali, I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Implementation of the SAKTI application. (2024–2025). *Case studies and evaluations from various institutional reports*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Petunjuk teknis penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)*. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2020 tentang Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi*. Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Panduan teknis likuidasi Satker dengan penggunaan SAKTI*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Nugroho, A. H., & Purnomo, H. (2021). Dampak digitalisasi sistem keuangan negara terhadap akuntabilitas: Studi kasus aplikasi SAKTI. *Jurnal Tata Kelola & Keuangan Publik*, 5(1), 89–105.
- Panduan teknis modul likuidasi SAKTI. (2024). *Dokumentasi dan pedoman modul likuidasi*.
- Putri, D. A., & Ramadhan, B. (2023). Kesiapan SDM dalam implementasi SAKTI pada Satker yang sedang restrukturisasi. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintah*, 11(3), 77–95.
- Rahayu, P., & Wijayanti, L. (2022). Manajemen perubahan organisasi dan sistem informasi keuangan: Pembelajaran dari restrukturisasi instansi pemerintah. *Jurnal Administrasi*

- Publik*, 14(2), 210–230.
- Ruskam, M., & Siregar, E. (2023). Tantangan dan strategi rekonsiliasi BMN dalam sistem SAKTI: Perspektif unit Satker. *Jurnal Manajemen Aset Publik*, 3(1), 35–54.
- Sari, F., & Hidayat, T. (2022). Pemanfaatan sistem aplikasi keuangan terintegrasi sebagai alat kontrol intern pemerintah (Studi di Kementerian). *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 8(4), 201–218.
- Usman, K., Tuli, H., & Lukum, A. (2024). Analisis penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam penyajian laporan keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Sistem Informasi (JEMSI)*.
- Yuliana, D., & Hartono, A. (2024). Percepatan likuidasi Satker melalui Sistem SAKTI: Evaluasi kebijakan dan dampaknya. *Jurnal Kebijakan Fiskal Publik*, 2(1), 50–67.